

STRATEGI KOMPI SATUAN TUGAS PENGAMANAN PERBATASAN (SATGAS PAMTAS) DALAM MENJAGA DAN MENGAMANKAN DAERAH PERBTASAN INDONESIA DI PULAU SEBATIK KABUPATEN NUNUKAN

Herdianto¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana strategi dari Kompi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) dalam menjaga dan mengamankan daerah perbatasan Indonesia di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan, serta untuk melihat hasil yang dicapai dengan strategi yang sudah ditetapkan dan dijalankan oleh Kompi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas)

Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan tentang variabel yang diteliti. Analisis data model interaktif dari Milles dan Huberman, yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyerderhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan oleh Kompi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) dalam menjaga dan mengamankan daerah perbatasan Indonesia di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan yaitu meliputi menciptakan stabilitas keamanan disepanjang perbatasan wilayah darat Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur, menjamin keutuhan wilayah di perbatasan dengan tidak terjadi pergeseran/hilangnya patok batas, mewujudkan wilayah yang bebas dari pelanggaran pelintas batas, penebangan kayu, ilegal dan penyelundupan, mencegah terjadinya penyelundupan barang-barang ilegal dari Malaysia ke Indonesia, melaksanakan kegiatan binter (pembinaan teritorial) terbatas kepada masyarakat perbatasan disekitar pos. Kompi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) secara keseluruhan telah mengoptimalkan pada setiap pelaksanaannya, terbukti dengan kurangnya terjadi pelanggaran lintas batas di pulau Sebatik, terciptanya rasa aman dari penduduk atau warga Indonesia di Pulau Sebatik., walaupun dalam pelaksanaannya Kompi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) masih memiliki berbagai kendala, namun selama ini kendala-kendala yang ada masih dapat diatasi.

Kata Kunci: Strategi, Kompi Satuan Tugas, Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas), Daerah Perbatasan.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: herdylatief@yahoo.com

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil dengan jumlah $\pm$ 17.508 pulau. Kondisi geografis tersebut menyebabkan Indonesia berbatasan dengan banyak negara, baik di darat maupun laut. Di daratan, Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara yaitu Malaysia (Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dengan Serawak dan Sabah), propinsi Papua dengan Papua New Guinea dan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Lorosae. Di wilayah laut, berbatasan dengan sepuluh negara yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Palau, Papua New Guinea, Australia dan Timor Lorosae.

Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber kekayaan alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Di satu sisi, wilayah perbatasan suatu negara merupakan warisan yang tak ternilai harganya, yang mana apabila dikelola dengan baik dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional menuju terwujudnya bangsa yang maju, namun di lain sisi kondisi ini potensial memunculkan berbagai permasalahan nasional, salah satu di antaranya sebagai pintu gerbang masuknya ancaman atau gangguan yang berasal dari luar negeri yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri.

Perlunya keseriusan aparat yang bertugas dan yang terkait untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan yang tidak terlepas dari tingginya potensi terjadinya kejahatan di wilayah tersebut. Ada beberapa bentuk kejahatan (lintas batas) yang potensial terjadi di wilayah perbatasan, di antaranya: *terorisme*, bajak laut, *illegal logging*, *illegal fishing*, perdagangan manusia (*human trafficking*), penyelundupan (*smuggling*), dan perdangangan obat-obat terlarang (*drug trafficking*). Dalam perkembangannya, kejahatan lintas batas ini mengalami peningkatan yang relatif tajam serta menimbulkan kerugian yang sangat besar baik bagi masyarakat maupun negara, seperti yang terjadi pada kasus *illegal logging*, *illegal fishing*, sedangkan kerugian yang menimpa warga masyarakat akibat aktivitas ilegal di wilayah perbatasan, di antaranya perdagangan manusia (*human trafficking*), penyelundupan (*smuggling*), perdangangan obat-obat terlarang (*drug trafficking*).

Wilayah perbatasan yang merupakan wilayah yang paling strategis adalah Pulau Sebatik karena posisinya menghadapi ancaman langsung dari luar, tetapi juga memiliki peluang karena menjadi pintu gerbang keluar masuknya barang dan jasa dari dan keluar wilayah NKRI. Dengan posisi yang strategis ini membawa konsekuensi logis bahwa wilayah perbatasan harus memiliki tingkat keamanan yang baik agar keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI dapat dijaga. Maka dari itu sangat diperlukan eksistensi Kompi Satuan Petugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) tersebut dalam menjaga dan mengamankan daerah perbatasan khususnya di Pulau Sebatik.

Berbagai macam masalah terjadi di Pulau Sebatik akibat dampak berbatasan langsungnya pulau tersebut dengan negara lain yaitu Malaysia. Ada beberapa Masalah yang sering terjadi di Pulau sebatik yang tentunya merugikan masyarakat

Sebatik bahkan merugikan negara. Seperti masalah lintas batas, banyak masyarakat yang keluar masuk perbatasan kedua negara tanpa dilengkapi dokumen yang sah kemudian waktu tinggal melebihi ketentuan waktu yang sudah ditetapkan. Penyelundupan sembako dari Malaysia sangat juga sering terjadi. Hal ini dikarenakan dekatnya akses distribusi sembako ilegal dari Malaysia ke Sebatik serta banyaknya jumlah pelabuhan-pelabuhan kecil tradisional yang menjadi jalur keluar masuk barang untuk masyarakat. Pulau sebatik juga menjadi tempat peredaran narkoba di wilayah perbatasan. Pulau sebatik menjadi pintu masuk perlintasan narkoba internasional. Banyaknya pelabuhan-pelabuhan kecil menyebabkan satgas pamtas kesulitan dalam pengawasan dan pemantauan peredaran atau perlintasan narkoba. Hal lain yang juga menjadi masalah di wilayah perbatasan di Pulau Sebatik yaitu masalah infiltrasi, timbul kerawanan masuknya berbagai gerakan separatis dari Malaysia maupun Filipina.

KERANGKA DASAR TEORI

Strategi

Menurut Porter dalam rangkuti (2002:3) strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai tujuan bersaing. Selanjutnya Stephanie K. Morris (umar, 2002:3) menegaskan bahwa strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu upaya bagaimana agar tujuan dapat tercapai.

Thomson dalam oliver (2007:2) mendefinisikan strategi sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir : hasil akhir menyangkut tujuan dan sasaran organisasi. Ada strategi yang luas untuk keseluruhan organisasi dan strategi kompetitif untuk masing-masing aktifitas. Sementara itu strategi fungsional mendorong secara langsung strategi kompetitif. Sanjaya (2007:126) mengatakan, “strategi diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang di desain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.

Pupuh Fathurrohman dan M.Sobri Sutikno (2007:3) mengatakan bahwa starategi dapat diartikan sebagai siasat, kiat, trik dan cara, sedangkan secara umum strategi adalah suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Chandler (dalam Amstrong, 2003:38) strategi adalah penetapan tujuan jangka panjang dan sasaran perusahaan, serta penerapat serangkaian tindakan dan alokasi sumber daya yang penting untuk melaksanakan sasaran ini.

Alwi (2002:307) mengemukakan bahwa strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dengan melibatkan semua faktor andalan dalam organisasi secara strategi.

Sedangkan menurut Draft (2002:307) strategi yaitu rencana tindakan yang menjabarkan alokasi sumber daya dan aktifitas-aktifitas lain untuk menanggapi lingkungan dan membantu organisasi meraih sasarannya.

Pengertian Pertahanan dan Keamanan Negara

Hakikat pertahanan dan keamanan negara adalah perlawanan rakyat semesta, dengan pengertian bahwa seluruh rakyat sesuai dengan bidang, kodrat, dan kemampuannya masing-masing diikutsertakan dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Di bawah pimpinan pemerintah, seluruh potensi nasional dikerahkan dan digerakkan secara terpimpin, terkoordinasi dan terintegrasi untuk menghadapi dan mengatasi segala macam dan segala bentuk ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Ada dua konsep dalam mengimplementasikan Hankamnas, yaitu konsep pertahanan dan konsep keamanan nasional.

Pertahanan Daerah Perbatasan

Masalah pertahanan di wilayah perbatasan sangat terkait erat dengan konsepsi dasar tentang negara sebagai entitas yang memiliki kedaulatan, penduduk, dan wilayah serta tafsir atau persepsi atas ancaman yang dihadapi. Dengan demikian, pertahanan wilayah perbatasan dapat disimpulkan sebagai segala upaya untuk mewujudkan eksistensi suatu negara yang ditandai dengan terlindunginya kedaulatan, penduduk dan wilayah dari pelbagai jenis ancaman. Konsepsi ini merupakan bagian dari satu pemahaman totalitas mengenai konsep ‘keamanan nasional’ yang intinya adalah “kemampuan negara melindungi apa yang ditetapkan sebagai nilai-nilai inti (*core values*), dimana pencapaiannya merupakan sebuah proses terus-menerus, dengan menggunakan segala elemen *power* dan *resources* yang ada serta melingkupi semua aspek kehidupan.

Pertahanan wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus dipahami sebagai fungsi yang bersifat permanen, selama diakuinya eksistensi negara. Di sisi lain, ada fungsi yang akan selalu berubah dan mengalami penyesuaian, hak tersebut adalah, “analisis ancaman (*threat assessment*) yang mempengaruhi besaran sumber daya dan kekuatan yang diperlukan, dan bagaimana sumber daya dan kekuatan itu diorganisir untuk keperluan pengelolaan dan pertahanan wilayah perbatasan.”

Dalam buku “Profil Pengamanan Perbatasan Darat RI-Malaysia Korem 091/ASN” dikatakan bahwa Korem 091/ASN melaksanakan tugas menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan tugas pengamanan perbatasan darat RI-Malaysia di Kalimantan Timur dengan menggelar satu kolakops korem 091/ASN dengan satu Batalyon Satgas Pamtas dengan tugas sebagai berikut:

- 1) Menciptakan stabilitas keamanan disepanjang perbatasan wilayah darat Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur.
- 2) Menjamin keutuhan wilayah di perbatasan dengan tidak terjadi pergeseran/hilangnya patok batas.
- 3) Mewujudkan wilayah yang bebas dari pelanggaran pelintas batas, penebangan kayu, ilegal dan penyelundupan.
- 4) Mencegah terjadinya penyelundupan barang-barang ilegal dari Malaysia ke Indonesia.

- 5) Melaksanakan kegiatan binter (pembinaan teritorial) terbatas kepada masyarakat perbatasan disekitar pos.

Daerah Perbatasan

Dalam bahasa Inggris perbatasan diistilahkan dengan kata *boundary* dan *frontier*, dalam bahasa sehari-hari dua istilah itu merupakan sinonim, tetapi dalam geografi politik keduanya mempunyai pengertian yang berbeda. *Boundaries* adalah garis-garis yang mendemarkasikan batas-batas terluar dari wilayah suatu negara. Namun *frontiers* mewujudkan *zone-zone* (jalur) dengan lebar yang beraneka yang memisahkan dua wilayah yang berlainan negaranya. Teori perbatasan, menurut Karl Haushofer, berhubungan dengan perluasan wilayah. Karl Haushofer, penemu teori Geopolitik, tahun 1989. Gagasannya yang menghubungkan antara politik dan geografi, melahirkan konsep “kebenaran” (*living space*).

Wilayah atau *zone* perbatasan adalah bagian wilayah suatu negara yang letaknya berbatasan dengan wilayah negara lain. Wilayah perbatasan ini bersifat peralihan. Nilai-nilai yang berlaku di wilayah perbatasan ini hampir bersamaan dengan nilai-nilai yang berlaku di wilayah perbatasan di seberangnya.

Jadi, wilayah perbatasan ini terdiri dari 2 bagian, yaitu wilayah perbatasan bagian dalam dan wilayah perbatasan bagian luar. Kedua wilayah tersebut saling mempengaruhi.

Ahli geografi politik Theodore Ratzel sejak awal mengatakan bahwa “perbatasan” merupakan *barometer* bagi keselamatan suatu negara maupun dalam hubungannya dengan negara lain. Di dalam isu perbatasan itu, terletak berbagai persoalan tentang, misalnya: identitas, sumber daya, kedaulatan, dan kemungkinan silang-sengketa antar entitas politik karena persoalan-persoalan yang ada. Menurut para ahli hukum internasional seperti Green NA Maryan, Shaw Malcolm, JG Strake dan Burhan Tsani, perbatasan wilayah adalah batas terluar wilayah suatu negara berupa suatu garis *imaginer* yang memisahkan wilayah suatu negara dengan wilayah negara lain darat, laut, maupun negara yang dapat dikualifikasi dalam terminologi “*Border Zone*” (Zona Perbatasan) maupun “*Customs Free Zone*” (Zona Bebas Kepabeanan).

Konsep perbatasan wilayah menurut peraturan presiden No. 7 Tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJM-Nasional 2004-2009) telah menetapkan arah dan pengembangan wilayah perbatasan negara sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin kebutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan dan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat diwilayah perbatasan.

Kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan

Diperlukan suatu kebijakan dasar yang dapat dijadikan sebagai payung seluruh kebijakan dan strategi yang berlaku secara nasional untuk seluruh

kawasan perbatasan. Secara umum dalam pengembangan kawasan perbatasan diperlukan suatu pola atau kerangka penanganan kawasan perbatasan yang menyeluruh (holistic), meliputi berbagai sektor dan kegiatan pembangunan, serta koordinasi dan kerjasama yang efektif mulai dari Pemerintah Pusat sampai ke tingkat Kabupaten/Kota. Pola penanganan tersebut dapat dijabarkan melalui penyusunan kebijakan dari tingkat makro sampai tingkat mikro dan disusun berdasarkan proses partisipatif, baik secara horisontal di pusat maupun vertikal dengan pemerintah daerah. Sedangkan jangkauan pelaksanaannya bersifat strategis sampai dengan operasional.

Adapun kebijakan pengembangan kawasan perbatasan antarnegara terdiri dari tujuh kebijakan, yakni:

- 1) Menata batas kontinen dan maritim perbatasan antarnegara dalam rangka menjaga dan mempertahankan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Memberi perhatian lebih besar kepada kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara dan pintu gerbang internasional bagi kawasan Asia dan Pasifik.
- 3) Mengembangkan kawasan perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan secara serasi.
- 4) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kecamatan kecamatan yang berbatasan langsung secara selektif dan bertahap sesuai prioritas dan kebutuhan.
- 5) Meningkatkan perlindungan sumberdaya alam hutan tropis dan kawasan konservasi, serta mengembangkan kawasan budidaya secara produktif bagi kesejahteraan masyarakat lokal.
- 6) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan dan informasi.
- 7) Meningkatkan kerjasama pembangunan di bidang sosial, budaya, keamanan dan ekonomi dengan negara-negara tetangga.

Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan

Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan Kebijakan pengembangan kawasan perbatasan, baik darat dan laut, perlu dijabarkan ke dalam strategi umum yang dilaksanakan melalui upaya-upaya: (1) penyelarasan kegiatan-kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui anggaran pembangunan sektoral dan daerah, yang diarahkan bagi pengembangan kawasan pertumbuhan, dan pengembangan wilayah terpadu kawasan perbatasan; (2) pembentukan lembaga pengembangan kawasan perbatasan nasional yang bertugas menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan pengembangan kawasan perbatasan di tingkat pusat; (3) keberpihakan dan perhatian yang lebih besar kepada sektor-sektor di pusat terhadap kawasan perbatasan; dan (4) pemberian dukungan dan fasilitasi pengembangan kawasan perbatasan oleh instansi pusat dan pihak investor dalam maupun luar negeri.

Sedangkan strategi umum pengembangan kawasan perbatasan tersebut adalah:

- 1) Penetapan garis batas antar negara
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana perbatasan melalui pembangunan pos-pos lintas batas beserta fasilitas bea cukai, imigrasi, karantina dan keamanan, serta sarana dan prasarana fisik lainnya.
- 3) Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan pulau-pulau terluar.
- 4) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang telah mendapatkan respons dari negara tetangga.
- 5) Peningkatan kualitas dan pengembangan pemberdayaan sumberdaya manusia.
- 6) Peningkatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat di daerah.
- 7) Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan dan kelautan.
- 8) Peningkatan aparat keamanan dan pertahanan di sepanjang perbatasan dan pulau-pulau terluar.
- 9) Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kehidupan bernegara dan berbangsa bagi masyarakat perbatasan.
- 10) Peningkatan kerjasama bilateral di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan data-data dari penelitian lapangan yang penulis lakukan pada Kompi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan dengan sumber data ditentukan menggunakan Teknik *Purposive Sampling* serta teknik pengumpulan data berupa Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yang terdiri dari Observasi, Wawancara dan Penelitian Dokumen. Data-data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu mendeskripsikan/menjelaskan suatu keadaan dengan bersumber pada fakta-fakta dalam memperoleh gambaran yang lengkap mengenai Strategi Kompi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) dalam menjaga dan mengamankan daerah perbatasan Indonesia di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Strategi Kompi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) dalam menjaga dan mengamankan daerah perbatasan Indonesia di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan.

Berikut akan penulis paparkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dari data-data yang telah didapatkan dan dikumpulkan melalui hasil wawancara dan dokumentasi lapangan, kemudian akan dibahas sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada empat fokus penelitian yang akan dibahas. Pertama, Menjamin keutuhan wilayah di perbatasan dengan tidak terjadi pergeseran/hilangnya patok batas. Kedua, Mewujudkan wilayah yang bebas dari pelanggaran pelintas batas, penebangan kayu, ilegal dan penyelundupan. Ketiga, Mencegah terjadinya penyelundupan barang-barang ilegal dari Malaysia ke

Indonesia. Keempat, Melaksanakan kegiatan binter (pembinaan teritorial) terbatas kepada masyarakat perbatasan disekitar pos.

Untuk mengetahui bagaimana strategi Kompi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) dalam menjaga dan mengamankan daerah perbatasan Indonesia di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan, penulis akan melakukan pembahasan berdasarkan fokus penelitian yang merupakan tugas pokok dari Kompi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) itu sendiri.

Menjamin Keutuhan Wilayah di Perbatasan Dengan Tidak Terjadi Pergeseran/Hilangnya Patok Batas.

Patroli patok perbatasan merupakan cara yang dilakukan oleh Kompi Satgas Pamtas untuk menjamin keutuhan wilayah di perbatasan dengan tidak terjadi pergeseran/hilangnya patok batas. Patroli patok perbatasan biasanya ditempuh dengan berjalan kaki. Patroli patok perbatasan dilakukan untuk mengecek keamanan wilayah RI-Malaysia untuk menciptakan situasi yang kondusif.

Pelaksanaan patroli patok batas dilaksanakan secara rutin minimal dua minggu sekali oleh personel Pos Satgas Pamtas Yonif 433/JS dengan kekuatan satu regu (sepuluh orang). Setiap pelaksanaan patroli patok batas dipimpin oleh seorang Komandan Regu. Patroli patok batas ditempuh dengan berjalan kaki. Hal ini dilakukan karena medan tidak memungkinkan untuk ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor. Sebagian besar patok batas terletak ditengah hutan dengan medan yang cukup sulit. Sehingga hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki menyusuri hutan-hutan dan membuat jalan setapak untuk dilalui.

Jarak yang ditempuh dalam patroli patok batas terbilang cukup jauh yaitu antara sepuluh kilometer sampai dengan tiga puluh kilometer disekitar garis perbatasan RI-Malaysia. Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan patroli patok batas yaitu tiga sampai dengan tujuh hari karena jarak patok batas yang satu dengan yang lain cukup jauh. Sasaran pelaksanaan patroli patok batas tidak hanya untuk melakukan pengecekan patok-patok batas saja namun juga untuk melakukan pemantauan terhadap pelanggaran pelintas batas serta untuk melakukan pemantauan berbagai kegiatan illegal baik illegal logging maupun penyelundupan sembako, narkoba dan barang-barang illegal lainnya.

Hingga saat ini khususnya daerah Pulau Sebatik tidak ada terjadi pergeseran patok perbatasan. Hal ini dikarenakan adanya konsistensi petugas pengamanan perbatasan dalam hal ini Kompi Satgas Pamtas yang rutin melaksanakan patroli patok perbatasan yang menjadi upaya dalam menjaga dan mengamankan daerah perbatasan di Pulau Sebatik. Dengan adanya Kompi Satgas Pamtas, wilayah perbatasan dapat terjaga dengan baik. Namun tentunya keberadaan Kompi Satgas Pamtas dalam menjaga dan mengamankan daerah perbatasan harus didukung dengan sarana dan prasaran yang memadai khususnya persenjataan. Dan yang terpenting adalah adanya dukungan oleh masyarakat, pemerintah dan seluruh elemen yang ada dalam membantu Kompi Satgas Pamtas dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara.

Mewujudkan Wilayah Yang Bebas Dari Pelanggaran Pelintas Batas, Penebangan Kayu, Ilegal dan Penyelundupan

Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Kompi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) yang menjadi upaya atau strategi dalam mewujudkan wilayah yang bebas dari pelanggaran pelintas batas, ilegal dan penyelundupan. Diantaranya yaitu dengan melakukan sweeping atau melaksanakan pemeriksaan di pos pelintas batas. Hal ini dilaksanakan untuk mencegah terjadinya berbagai pelanggaran-pelanggaran di wilayah perbatasan Indonesia.

Sweeping dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kompi satgas Pamtas dilakukan secara mendadak. Untuk pemeriksaan di pos lintas batas dilaksanakan dari pagi hari hingga sore hari. Setiap harinya ada 5 personel pos yang menjaga dan melakukan pemeriksaan di pos lintas batas. Dilakukan secara bergantian setiap harinya. Setiap pelintas batas harus diperiksa barang dan identitasnya. Agar lebih efektif, dalam melakukan sweeping Kompi Satgas Pamtas menyebar pasukannya tidak di satu titik saja melainkan ada diberbagai titik. Hal ini dilakukan untuk mencegah atau menghadang bagi pelintas batas yang memilih jalur-jalur lain untuk masuk ke wilayah Indonesia untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti penyelundupan narkoba, sembako dan lain lain. Bagi pelintas batas yang tidak memiliki kelengkapan dokumen baik pas lintas batas (PLB) maupun pasport akan dikembalikan ke daerah asalnya dan tidak diizinkan untuk melakukan lintas batas baik yang mau masuk ke Indonesia maupun yang mau keluar dari Indonesia.

Meskipun selama ini ada petugas pengamanan perbatasan dalam hal ini Kompi Satgas Pamtas, kegiatan pelanggaran pelintas batas, ilegal dan penyelundupan masih saja sering terjadi. Hal ini dikarenakan adanya tingkat ketergantungan yang tinggi dari warga Sebatik terhadap Malaysia. Kegiatan ekonomi warga Sebatik sangat tergantung pada negara Malaysia dengan alasan dekatnya akses distribusi barang dari Malaysia ke Sebatik. Hal ini menjadi penyebab potensi terjadinya pelanggaran pelintas batas, ilegal dan penyelundupan. Namun Kompi Satgas Pamtas sebagai petugas pengamanan perbatasan tidak tinggal diam melihat hal ini. Kompi Satgas Pamtas melakukan upaya-upaya pencegahan bagi pelanggaran lintas batas tersebut. Yaitu dengan melakukan sweeping dan pemeriksaan di pos lintas batas. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sweeping dan pemeriksaan tersebut salah satunya yaitu pengurus tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tidak melengkapi dokumen lintas batas para TKI sehingga para pengurus TKI memilih jalur-jalur lain untuk melintasi batas negara dengan maksud lari dari pemeriksaan petugas pengamanan perbatasan. Selain itu adanya kearifan lokal bagi warga sekitar batas wilayah yang tidak memiliki kelengkapan dokumen lintas batas untuk diperbolehkan melakukan lintas batas untuk membeli kebutuhan hidupnya seperti sembako dan lain-lain. Peraturan yang berlaku yang seyogianya harus dipatuhi oleh seluruh warga masyarakat perbatasan malah terpinggirkan oleh adanya kearifan lokal tersebut.

Mencegah Terjadinya Penyelundupan Barang-barang Ilegal Dari Malaysia ke Indonesia

Dekatnya akses distribusi barang dari Malaysia ke Indonesia membuat warga Sebatik lebih memilih untuk mengambil barang atau membeli barang ke Malaysia dalam hal ini Tawau. Dengan jarak yang dekat akan memberikan keuntungan yang lebih besar kepada para pedagang atau pengusaha bila mereka mengambil atau membeli barang dari Tawau. Namun tidak jarang terjadi penyelundupan barang-barang ilegal dari Malaysia. Melihat hal ini, dibutuhkan peran Kompi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) untuk mencegah terjadinya penyelundupan barang-barang ilegal yang kerap terjadi di wilayah Perbatasan Khususnya Pulau Sebatik.

Pos lintas batas atau pos pemeriksaan lintas batas merupakan pintu gerbang pemeriksaan yang strategis dalam rangka mendukung pemberian pelayanan kepada para pelintas batas antar negara. Keberadaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Republik Indonesia dengan negara tetangga. Di pos lintas batas ini lah Kompi Satgas Pamtas melakukan pemeriksaan kepada semua masyarakat yang melakukan lintas batas negara baik yang masuk ke negara Indonesia maupun yang mau keluar kenegara tetangga. Setiap barang bawaan dan identitas diperiksa secara ketat oleh Kompi Satgas Pamtas yang bertugas melakukan penjagaan di pos lintas batas.

Kompi Satgas Pamtas juga melakukan pengendapan dalam menggagalkan upaya-upaya penyelundupan barang-barang ilegal dari Malaysia ke Indonesia. Pengendapan merupakan suatu strategi atau upaya yang dilakukan oleh Kompi Satgas Pamtas dalam mencegah dan menggagalkan penyelundupan barang-barang ilegal dari Malaysia ke Indonesia dengan cara menebar prajurit di jalur-jalur tikus yang dapat dilalui oleh para penyelundup. Hal ini dilakukan karena para penyelundup tidak masuk atau melintas melalui pos lintas batas, melainkan melalui jalur-jalur tikus atau jalur-jalur kecil.

Dalam mencegah terjadinya penyelundupan barang-barang ilegal dari Malaysia ke Indonesia, Kompi Satgas Pamtas tidak hanya melakukan pemeriksaan di pos lintas batas saja. Karena mereka menyadari ada banyak jalur tikus di pulau Sebatik yang bisa dilalui oleh para penyelundup barang ilegal. Kompi Satgas Pamtas juga melakukan pengendapan. Dalam hal ini, Kompi Satgas Pamtas melakukan penghadangan di jalan-jalan tikus di sepanjang patok perbatasan yang dilakukan secara mendadak. Kompi Satgas Pamtas juga memanfaatkan informasi yang datang dari masyarakat untuk mengawasi orang-orang tertentu karena adanya gerik-gerik yang mencurigakan. Selama ini, penyelundupan yang paling rawan terjadi adalah minuman keras atau miras dan narkoba khususnya sabu-sabu. Selama penugasan YONIF LINUD 433/JS KOSTRAD di Pulau Sebatik, telah menangkap atau menggagalkan penyelundupan narkoba sebanyak enam kali, penyelundupan minuman keras empat kali, dan kasus TKI ilegal sebanyak delapan kali khusus di pulau Sebatik.

Pencegahan penyelundupan barang-barang ilegal dari Malaysia ke Indonesia selama ini berjalan dengan baik dan efektif. Namun ada kendala yang

dihadapi dalam melaksanakan pemeriksaan barang-barang warga yang masuk dari Malaysia ke Indonesia, yaitu terkadang ada warga pelintas batas yang tidak mau diperiksa barang bawaannya. Sehingga ia memilih untuk tidak melintas melalui pos pelintas batas dan lebih memilih jalan-jalan alternatif atau jalan-jalan tikus. Namun tetap saja mereka tidak bisa melintas dengan mudah karena Kompi Satgas Pamtas juga sering menebar prajurit di jalan-jalan tikus sebagai upaya untuk mencegah bagi mereka yang melintas tidak melalui pos pelintas batas. Selain itu yang menjadi kendala adalah banyaknya pelabuhan-pelabuhan kecil yang ada di Pulau Sebatik selain pelabuhan resmi, sehingga Kompi Satgas Pamtas kesulitan untuk melakukan pencegahan penyelundupan barang-barang ilegal dari Malaysia ke Indonesia. Solusinya adalah menyebar jaring intelijen dengan memanfaatkan masyarakat untuk melaporkan kepada Kompi Satgas Pamtas jika terdapat gerakan-gerakan yang mencurigakan.

Melaksanakan Kegiatan Binter (Pembinaan Teritorial) Terbatas Kepada Masyarakat Perbatasan disekitar pos

Kegiatan pembinaan teritorial adalah kegiatan TNI bersama rakyat secara bahu membahu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar terwujud ketahanan wilayah dan kepekaan masyarakat dibidang pertahanan negara. Pembinaan teritorial dilaksanakan secara terus menerus pada bidang0bidang yang langsung bermanfaat bagi masyarakat dan memiliki korelasi dengan aspek pertahanan negara.

Kegiatan pembinaan teritorial merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kecintaan dan kesejahteraan serta membangun karakter masyarakat didaerah perbatasan. Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan teritorial kepada masyarakat perbatasan, ada banyak hal yang dilakukan atau yang diberikan oleh Kompi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) kepada masyarakat perbatasan.

Ada dua bentuk kegiatan yang menjadi upaya atau strategi yang dilakukan oleh Kompi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) dalam melaksanakan kegiatan binter (pembinaan teritorial) terbatas kepada masyarakat perbatasan disekitar pos, yaitu kegiatan fisik dan kegiatan non fisik. Kegiatan fisik diantaranya yaitu Melaksanakan kegiatan peka bhakti bersama masyarakat disekitar po, melaksanakan kegiatan rutin membantu dinas pendidikan dalam kegiatan proses mengajar di sekolah sekitar pos, Melaksanakan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh masing-masing pos untuk membantu masyarakat dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat. Sedangkan kegiatan fisiknya diantaranya yaitu melaksanakan kegiatan olahraga bersama masyarakat di sekitar pos, Melaksanakan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama masing-masing baik di pos maupun dilingkungan masyarakat, melaksanakan anjangsana ke Toga, Tomas, dan Todat, diwilayah desa binaan masing-masing 1 kali dalam seminggu, memberikan ceramah-ceramah tentang wawasan kebangsaan dan cinta tanah air di sekolah-sekolah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Strategi Kompi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) dalam menjaga dan mengamankan daerah perbatasan Indonesia di Pulau Sebatik yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dalam penulisan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Kompi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) telah menjalankan tugasnya dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari :

1. Upaya Kompi Satgas Pamtas dalam menjalankan tugasnya yaitu Menjamin Keutuhan Wilayah di Perbatasan Dengan Tidak Terjadi Pergeseran/Hilangnya Patok Batas. Dan terbukti bahwa Selama ini belum ada patok batas yang bergeser, kondisi patok batas sebagian besar dalam kondisi baik meskipun ada beberapa patok batas yang miring, amblas dan tenggelan, namun tidak ada patok yang sampai bergeser masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Upaya Kompi Satgas Pamtas dalam menjalankan tugasnya yaitu Mewujudkan Wilayah Yang Bebas Dari Pelanggaran Pelintas Batas, Penebangan Kayu, Ilegal dan Penyelundupan. Dalam mewujudkan wilayah yang bebas dari pelanggaran pelintas batas, penebangan kayu, ilegal dan penyelundupan, Kompi Satgas Pamtas melakukan sweeping dan pemeriksaan di pos lintas batas. Karena disadari ada banyak jalur-jalur tikus yang bisa dilalui oleh para warga pelintas batas untuk menghindari pemeriksaan di pos pelintas batas, Kompi Satgas Pamtas tidak menyebar pasukannya di satu titik saja. Kompi Satgas Pamtas menyebar pasukannya diberbagai titik. Hal ini dilakukan agar sweeping dan pemeriksaan pelintas batas bisa lebih efektif dengan demikian pelanggaran pelintas batas dapat diminimalisir.
3. Upaya Kompi Satgas Pamtas dalam menjalankan tugasnya yaitu Mencegah Terjadinya Penyelundupan Barang-barang Ilegal Dari Malaysia ke Indonesia. Pemeriksaan yang ketat dari Satgas Pamtas kepada masyarakat pelintas batas baik yang masuk ke Indonesia maupun yang keluar dari wilayah Indonesia. Semua barang bawaan warga yang melintas dibongkar dan diperiksa. Dengan demikian pelintas batas tidak bisa lagi untuk menyembunyikan barang-barang ilegal seperti narkoba, minuman keras dan lain-lain. Hal ini berdampak pada keadaan pulau Sebatik yang lebih aman dan nyaman.
4. Adanya peran Kompi Satgas Pamtas dalam Melaksanakan Kegiatan Binter (Pembinaan Teritorial) Terbatas Kepada Masyarakat Perbatasan disekitar pos yang dengan pembinaan teritorial tersebut telah meningkatkan kecintaan dan kesejahteraan serta membangun karakter masyarakat di daerah perbatasan.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Pos Satgas Pamtas yang berada dipinggir sungai perlu dipindahkan karena berpengaruh terhadap pengamanan materil pada saat musim hujan apabila sungai meluap yang berakibat timbulnya banjir.

2. Perlu pengadaan speed boat untuk Kompi Satgas Pamtas dalam pengawasan pelintas batas dan pencegahan penyelundupan. Sehingga Satgas Pamtas bisa melakukan pengawasan pelintas batas dan pencegahan penyelundupan tidak hanya di darat saja.
3. Perlunya perbaikan bangunan pos Satgas Pamtas yang saat ini kondisi bangunannya banyak yang rusak dan lapuk.
4. Perlu adanya dukungan solar cell dan inverter untuk pos Satgas Pamtas yang tidak terdapat aliran listrik yang bisa digunakan untuk mendukung penerangan.
5. Satgas Pamtas perlu dilengkapi dengan alat pendeteksi narkoba sehingga dalam pemeriksaan barang-barang dari warga pelintas batas dengan bisa dengan mudah diperiksa ada tidaknya narkoba yang dibawa oleh pelintas batas tersebut tanpa harus membongkar barang dari para pelintas batas.
6. Pemerintah pusat/daerah perlu menyiapkan sarana transportasi udara (helikopter) kepada Kompi Satgas Pamtas dalam memantau keamanan wilayah perbatasan melalui udara.

Daftar Pustaka

- A.MuhaiminYahya, 2006. *Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia*, Tiara Wacana, Yogyakarta
- Alwi, Syafaruddin.2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi Keunggulan Kompetitif*. BPFE.Yogyakarta.
- Amal Ichlasul dan Armawi Armaidy, 1998.*Regionalisme, Nasionalisme, dan Ketahanan Nasioanl*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Daft, Richard L.2002. *Manajemen .Edisi ke-5*, Erlangga. Jakarta.
- DaoedJoesoef, 1973. *Dua Pemikiran Tentang Pertahanan Keamanan dan Strategi Nasional*. CSIS, Paris
- Faturrohman, Pupuh, 2007. *Strategi belajar mengajar melalui penanaman konsep Umum dan konsep islami*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Griffin, Ricky W. 2000. *Manajemen Jilid I*. Alih Bahasa Gina Gania. Erlangga. Jakarta
- Himpunan LEMHANNAS, 1980. *Bunga Rumpai Ketahanan Nasional (konsepsi&teori)*, PT. Ripres Utama, Jakarta.
- Ittihad Amin Zainul, 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Universitas Terbuka, Jakarta
- Kaelan & Zubaidi Achmad, 2007.*Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta
- KOREM 091/ASN, 2014. “*Profil Pengamanan Perbatasan Darat RI-Malaysia Korem 091/ASN*”. Samarinda
- KOREM 091/ASN, 2014.*Laporan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pamtas RI-Malaysia Komando Pelaksana Operasi KOREM 091/ASN Triwulan III*. Samarinda
- KOREM 091/ASN, 2015.*Laporan Evaluasi Pelaksanaan Tugas PAMTAS RI-Malaysia Komando Pelaksana Operasi KOREM 091/ASN Semester II*. Samarinda

- Michael, E Porter. 2002. *Strategi Bersaing (Competitive Strategy)*, penerjemah Rangkuti. Kharisma Publishing Group. Tangerang
- Miles, Mathew. B dan A. Michael Huberman, 2007. *Analisis Data Kualitatif*. University Indonesia. Jakarta
- Moleong, Lexy.J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Nawawi, Hadari, 2000. *Manajemen Strategy*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Sadirman, 2004. *Strategy Belajar Mengajar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sanjaya, Wina. 2008. *Strategy Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Media Predan, Jakarta
- Sumarsono.S dkk, 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Yamin Muhammad &Matangker Sebastian, 2006. *Intelijen Indonesia, Toward Profesional Intelligence*, Gadjah Mada University Press, Jakarta

Dokumen-dokumen:

- Undang-UndangDasar 1945 pada Pasal 27 ayat (3)
- Pada UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1)
- Pasal 30 Ayat (2), Pasal 30 Ayat (3), Pasal 30 Ayat (4)
- PeraturanPresidenNomor 39 Tahun 2005
- PeraturanPresiden No. 7 Tahun 2005
- UU RI No.2 Tahun 2002
- UU RI No. 20 tahun 1988
- UU No. 3 Tahun 2002
- Undang-UndangDasar 1945 pada Pasal 27 ayat (3)

SumberInternet :

- http://www.bappenas.go.id/files/3713/5648/9773/16peta-kemampuan-keuangan-provinsi-dalam-era-otonomi-daerah-tinjauan-atas-kinerja-pad-dan-upaya-yang-dilakukan-daerah__20081123002641__15.pdf(diakses 14 oktober 2014)
- <http://filsufgaul.wordpress.com/2012/03/14perbatasan-sebuah-konsep-mendasar/> (diakses 15 Oktober 2014)